

Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti^{*)} :

TIGA PRIORITAS UTAMA

Atasi Keterpurukan Ekonomi Saat Ini



Begitu Kabinet RI gotong royong secara resmi diumumkan oleh Presiden RI Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, redaksi Agrimedia segera menghubungi Menko Perekonomian, Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti untuk memberikan komentarnya di seputar permasalahan hutang Indonesia. Beliau menyanggupi, tetapi karena berbagai kesibukan dan aktivitas yang sangat padat lewat Asisten Menko Perekonomian Dr. Nizam Yunus beliau mengijinkan redaksi Agrimedia untuk menuliskan kembali berbagai tanggapan beliau atas isu serupa kepada berbagai wartawan yang mewawancarainya. Berikut adalah rangkaian ungkapan beliau yang berhasil dirangkum oleh redaksi Agrimedia.

Rampungnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2002, menjadi target utama yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti berulang kali saya sampaikan, RAPBN harus cepat kita selesaikan terlebih dahulu, dan yang cukup sulit (adalah bagaimana) agar defisit APBN jangan tambah membludak. RAPBN 2002 itu kan semacam peta jalan, di situ disimpulkan seluruh keinginan yang akan dilakukan pada 2002. Pembinaan tersebut perlu dilakukan karena Indonesia akan menghadapi sidang *Consultative Group on Indonesia* (CGI), dan pada bulan September mendatang Indonesia juga harus menyajikan posisi yang membaik dalam sidang Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, AS. Oleh karena itu jadi saya ingin CGI itu benar-benar membantu kita dan untuk itu penyusunan RAPBN 2002 ini harus rapi dan mampu meyakinkan para kreditor *Consultative Group on Indonesia* (CGI), karena Indonesia sekarang ini betul-betul membutuhkan bantuan.

Ada tiga program yang harus segera diupayakan untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia saat ini. **Pertama**, memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, **kedua**, meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), **ketiga**, menyelesaikan utang Indonesia yang saat ini sudah mencapai 1,5 kali Produk Domestik Bruto (PDB).

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Pentingnya pemberian kesempatan kerja seluas-luasnya pada masyarakat untuk segera diciptakan menjadi urgen mengingat telah lama rakyat menderita akibat krisis. Tim ekonomi akan bergerak cepat untuk penciptaan lapangan kerja. Terus terang kami risau melihat terbengkalainya perekonomian Indonesia selama ini. Selama tiga tahun banyak rakyat yang tidak memiliki pekerjaan layak. Dari pengalaman di Washington dalam memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia, saya melihat yang harus segera diupayakan adalah bagaimana memberikan kesempatan kerja. Tanpa kesempatan kerja orang tidak bisa hidup dengan baik, sulit menyekolahkan anak, bahkan mungkin untuk biaya nikah saja tidak ada. Daripada membicarakan tentang ekonomi rakyat dalam bahasa slogan lebih baik langsung membicarakan bagaimana memberikan kesempatan kerja, karena sudah tiga tahun Indonesia mengalami krisis yang menyebabkan jutaan orang menganggur (Berdasarkan data tahun 2000 tercatat 5,8 juta pengangguran terbuka).

Untuk itu, "ekonomi rakyat" harus diangkat secara konkret dan nyata. Dalam kaitan itulah pertumbuhan ekonomi yang ideal seyogyanya sekitar 7 persen pertahunnya, sebab sekitar 3 juta angkatan kerja harus bisa diserap. Kalau pertumbuhan hanya sekitar 4 persen (nilai pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam kesepakatan LoI antara

pemerintah dengan IMF yang ditandatangani 27 Agustus 2001 adalah antara 3-3,5%), angkatan kerja yang bisa diserap hanya separohnya, padahal kita mempunyai masalah besar dengan pengangguran. Memang sulit mencapai 7 persen yang ideal pada kurun waktu sampai 2004, tapi kita usahakan agar pertumbuhan ekonomi hingga 2004 dapat mencapai 6 persen.

Memang bukan persoalan yang mudah untuk menyiasati masalah ketenagakerjaan ini. Untuk itu kita harus membuat program yang berani untuk memenuhi kebutuhan para pencari kerja itu. Di antara sektor-sektor pekerjaan yang akan menjadi garapan utama adalah sektor yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Seperti pengerjaan irigasi tersier, jalan desa hingga pembersihan sungai dan pembangunan sekolah rakyat.

Langkah langkah strategis yang dapat ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja, yaitu dengan menggalakkan *self employee* (meminjam istilah BPS) atau yang dikerjakan sendiri, di mana program pembangunan dulu yang pernah dijalankan seperti Inpres Desa, pembangunan irigasi tersier, jalan kampung itu bisa dilaksanakan melalui subsidi desa. Hal lain adalah memperbanyak kredit candak kulak dan kredit mini.

Disamping itu, sektor swasta perlu didukung untuk secepatnya bangkit terutama pada sektor industri yang sifatnya padat karya. Karena itu perlu dipertimbangkan untuk mendapat perlakuan khusus dalam hal penentuan tarif pajak, agar jangan sampai membebani perusahaan yang justru menciptakan banyak lapangan kerja seperti industri sepatu, mebel dan kerajinan tangan.

Bentuk lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperjuangkan permohonan peningkatan perolehan dana hibah dari luar negeri seperti Australia (pemberi dana hibah

nomor satu di CGI), Amerika Serikat, dan lain-lain untuk keperluan penciptaan lapangan kerja.

Saya inginkan pada tahun ini kita akan mendapatkan dana hibah dari AS yang nilainya jauh lebih besar dari hibah tahun lalu sebesar 527 juta dollar AS. Perlu diingat bahwa Amerika Serikat dan Australia merupakan penyumbang dana hibah terbesar untuk Indonesia. Dari peningkatan hibah kedua negara itu, dana tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan kembali kesempatan kerja di pedesaan.

Tantangan terdekat adalah perlunya membangkitkan sektor swasta. Dari sini akan lahir lapangan kerja. Selain itu, untuk jangka waktu tiga tahun mendatang juga akan dicoba untuk menggiatkan program agar setiap keluarga memiliki rumah. Pembangunan sektor perumahan diharapkan dapat akan menggiatkan industri dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja.

USAHA KECIL MENENGAH

Pemberdayaan UKM tidak bisa dilakukan hanya dengan simbolis saja, sebagai contoh kebijakan perbankan yang mewajibkan penyaluran kredit kepada UKM sebesar 10-20 persen namun kenyataannya banyak yang lari ke sektor konsumtif.

Yang terpenting adalah memberikan kesempatan agar masyarakat ikut serta menangani proyek-proyek. Contoh lain kenyataan selama ini di lapang antara lain adanya perusahaan-perusahaan besar yang menjual sahamnya ke pasar modal, tetapi kenyataannya yang dijual tidak melebihi 10 persen, sehingga tetap menjadi perusahaan yang tertutup. Jadi privatisasi di Indonesia bukan hanya menswastakan BUMN, tetapi juga badan usaha milik keluarga yang tertutup.

Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang utama adalah bagaimana mengembalikan perbankan agar berfungsi secara normal, yakni menjadi lembaga *intermediary* (mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana itu dalam bentuk kredit).

Saat ini fungsi perbankan sebagai lembaga *intermediary* tidak berjalan sempurna karena lebih banyak dana-dana yang beredar di pasar uang daripada dalam bentuk pinjaman. Hal itu disebabkan oleh lambatnya restrukturisasi perusahaan yang saat ini ada di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Dengan demikian Restrukturisasi harus dipercepat agar roda ekonomi dapat berjalan baik.

Jadi dalam hal ini usaha kecil menengah (UKM) akan mendapatkan perhatian utama, untuk itu kita akan mendesak agar sektor perbankan giat mengucurkan kredit bagi sektor UKM. Apalagi selama ini, UKM memiliki catatan yang baik menyangkut pengembalian kredit pada sektor perbankan. Hanya saja hal ini kerap dilupakan, dan sektor perbankan kita terlalu mempedulikan kelompok usaha yang besar. Masih dalam konteks pembedardayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja, maka kegiatan pasar yang berbasis kredit mikro, seperti pasar Inpres, akan kembali digiatkan.

MASALAH PENYELESAIAN HUTANG LUAR NEGERI

Pemerintah akan berupaya memperbaiki peringkat (*rating*) utang luar negeri dari status CCC+ (peringkat yang menggambarkan adanya risiko utang tidak bisa dibayar, dan kemampuan membayar utang sangat tergantung pada situasi bisnis, finansial, dan kondisi ekonomi) menjadi status BB (menggambarkan utang tersebut mengandung unsur spekulatif, tetapi lebih tidak rentan terhadap risiko untuk tidak dibayar) bagi pemulihan citra perekonomian

Indonesia. Dengan peningkatan status tersebut, sektor usaha Indonesia yang saat ini masih tergolong *non-investment* dapat ditinjau kembali oleh kalangan investor. Pada akhirnya sektor usaha dapat memiliki akses ke pasar uang dan pasar modal internasional.

Dengan demikian pengusaha yang selama ini kesulitan dalam pembiayaan investasi maupun dalam pembiayaan perdagangan internasional akan dapat teratasi karena kepercayaan akan membaik. Kita ingin bermitra dengan pasar dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat internasional. Atas dasar itulah pemulihan citra harus dilakukan secepatnya di luar negeri. Jika itu jalan, peningkatan rating dari CCC+ menjadi BB setidaknya tercapai setengah tahun lagi. Sebab itu, harus ada kerja keras.

Kita saat ini sedang menghadapi tumpukan utang yang aduhai. Saya tidak berjanji tapi mari kita mulai. Hendaknya pembicaraan kita mengenai utang ini mulai dikaitkan dengan keharusan kita untuk membatasi. Selain membatasi, juga tepat untuk membayar. Tapi, untuk itu, kan harus ada dana alternatif. Dana alternatif itu pertama datang dari investor asing, dari pinjaman swasta di pasar internasional, yang lain lagi ya, di dalam negeri. Di mana pasar modal kita harus lebih hebat dan bank kita juga harus kembali solid.

Tapi, repotnya, pada waktu ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk kembali ke pasar internasional peringkat kita ini kan CCC+ atau *non-investment categories*. Dan bunga tambahan yang mencerminkan risiko itu di atas bunga instrumen yang dianggap paling aman di dunia ini, yaitu obligasi AS selama 10 tahun.

Persoalan restrukturisasi utang adalah persoalan waktu dan cara. Lembaga donor dunia seperti IMF sebenarnya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap Indonesia, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Jadi, buat

Indonesia saat ini penjamin satu-satunya adalah IMF. Kalau bukan dia tidak ada negara lain yang mau menjamin. Kalaupun mereka bertanya uang yang dipinjamkan akan dipakai apa itu adalah kerewelan yang wajar dari bank kepada nasabahnya. IMF tetap sebuah lembaga yang bisa diandalkan untuk mendapatkan pinjaman. Karenanya saya bingung, kenapa kini kita sering marah-marah sama IMF. Kok, malah kita mengatakan IMF menjadi sumber kemelut di negara kita? Dengan peringkat CCC plus itu, enggak ada negara yang mau memberikan garansi kepada kita.

Jadi, sebenarnya tidak ada sesuatu yang menjengkelkan dari IMF. Karena itu, Indonesia masih harus menjalin hubungan dengan IMF. Kita kan anggota IMF, dia berkewajiban menolong anggotanya dan bunga yang dipasang untuk anggota seperti kita ini cuma 3%-4%. Kalau dari negara lain bunganya bisa sampai 15%-16%. Jadi, kenapa mesti ribut?

Untuk masalah pembayaran utang, kita akan minta penundaan atau sebagian akan dilakukan *roll over* karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum memungkinkan. Kami akan mengusahakan agar utang jangka pendek bisa menjadi jangka menengah atau jangka panjang. Tapi orang akan memberikan kesan itu hanya untuk mengulur waktu.

Namun jika ekonomi telah *recovery* (pulih), tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan percepatan pembayaran hutang. Kalau diibaratkan, penyelesaian utang ini seperti akordion dimana sesekali ditarik atau dikembangkan. Kebijakan yang dipilih ini bukan berarti ingin mengemplang utang dan tidak berpikir ke arah itu karena akan mencemari kredibilitas negara di mata dunia.

Selama ini saya melihat Indonesia selalu memenuhi kewajibannya, baik angsuran pokok maupun bunganya walau bagaimanapun sulitnya. Utang luar negeri itu harus dibayar, nggak boleh nggak. Semoga sikap seperti ini juga

dilakukan swasta. Mereka harus punya rasa malu.

Dalam sejarahnya Indonesia tidak pernah menunggak utang, kita selalu membayar bunga dan angsuran. Jadi jangan sampai sejarah, yang demikian baik dan menjadi patokan bagi nilai kredit kita itu dirusak dengan argumen jangka pendek (penghapusan utang). Selama ini kita sudah mendapat penilaian sebagai negara yang selalu menepati janji dalam pembayaran utang. Jadi jangan dirusak, kalau mau merusak dalam sehari saja bisa. Menurut saya, lebih baik kita minta penundaan daripada minta penghapusan utang. Pembayaran utang akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Kalau pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, pembayaran akan dipercepat, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak selalu harus menghindari.

Dalam hidup itu tidak ada garis lurus dan besok utang selesai. Tidak ada hal itu dalam ekonomi. Kreditur melihat selama delapan tahun, Indonesia secara teratur membayar cicilan utang. Siapa tahu sisa utang itu oleh kreditur diubah statusnya menjadi *grant* atau hibah, kejadian ini mungkin saja terjadi. Saya berpendapat keringanan utang, misalnya *haircut*, sebaiknya bukan dari inisiatif Indonesia. Inisiatif ini diharapkan datang dari kreditur, terutama lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, CGI maupun Paris Club.

Selain itu kita perlu banyak belajar dari pengalaman negara lain yang dikenal sebagai *emerging market* dalam mengatasi permasalahan ekonominya, seperti Panama, Venezuela, Uruguay, Argentina, dan Santiago. Beberapa negara tersebut lama berkutat dalam persoalan utang, bahkan Venezuela pernah mendapatkan potongan utang.

(Sebagai catatan dari redaksi ketika majalah ini angkat cetak, pada tanggal 27 Agustus 2001 telah dilakukan penandatanganan LoI antara pemerintah Indonesia dengan IMF yang berdasarkan sumber dari Kantor Menko Bidang Perekonomian berisi kesepakatan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan 3-3,5% dan inflasi antara 9 – 11%
2. Uang beredar sebesar Rp 110,5 triliun pada September 2001 dan kenaikan uang beredar sebesar 12,5% pada Maret 2001
3. Pemerintah tidak akan mengupayakan pinjaman komersial luar negeri untuk pembiayaan anggaran,

termasuk sekuritisasi atau *forward sale* penerimaan dari sumber daya alam.

4. Kebijakan Repeta 2002 adalah menggunakan fiskal jangka menengah berkelanjutan, yang antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak bukan migas, mengurangi subsidi, mengamankan desentralisasi fiskal, dan menekan defisit hingga 2-3% dari PDB
5. Pemerintah merencanakan privatisasi Bank Mandiri dengan share perdana yang diterbitkan sampai dengan 30%, yang diharapkan dapat diluncurkan pada akhir 2001 dan selesai pada kuartal I/2002. Pemerintah juga akan mengkaji privatisasi bank pemerintah lain dan mengumumkan rencana tersebut pada Desember 2001, setelah konsultasi dengan DPR.)

Indonesia sebenarnya telah mendapatkan penjadwalan utang dari Paris Club I dan II lalu - masing-masing menyetujui penjadwalan utang US\$4,2 miliar dan US\$5,8 miliar yang jatuh tempo 1998 hingga Maret 2002 - tetapi dianggap belum cukup untuk menjadwalkan kembali beban utang luar negeri Indonesia, sehingga harus melakukan negosiasi babak berikutnya.

Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan mengusulkan kepada konsorsium kreditur untuk menyelenggarakan Paris Club III sebagai upaya mengurangi beban utang Indonesia. Usulan untuk pertemuan Paris Club III, berkaitan dengan penjadwalan utang luar negeri Indonesia, merupakan langkah yang sangat penting untuk kelanjutan APBN.

Demikian rangkuman ungkapan Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang berhasil dihimpun oleh redaksi. Sebagai catatan tambahan Menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian adalah Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) merangkap Kepala Bappenas serta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (AIS)

KUNJUNGI,
home page MMA-IPB
di **www.mma.ipb.ac.id**

Magister Manajemen Agribisnis - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Go Favourite Help

Address http://www.mma.ipb.ac.id

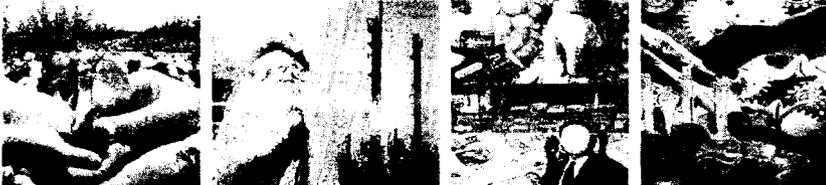
SELAMAT DATANG DI BERANDA PURI KAMI



MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



"Tumbuh dan Berkembang Kokoh"



Tentang Kami
Program
Kurikulum
Metode
Fasilitas
Pendaftaran
Biaya Akademik
Kalender Akademik
Organisasi
Pengajar
Alumni
Link Ke Tempat Lain

**DALAM LINGKUNGAN BISNIS YANG DINAMIS,
INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA MENJAMIN KEBERHASILAN BISNIS
UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN KOKOH.**
Kesempatan masih terbuka bagi sarjana dari berbagai disiplin ilmu untuk mengikuti
Program Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor :

- Kelas Reguler (pagi dan siang hari di Bogor)
- Kelas Eksekutif Jakarta (sore & malam hari di Jakarta)
- Kelas Eksekutif Bogor (malam hari di Bogor)
- Kelas Khusus (*in-house program*)

PROGRAM PASCASARJANA

Done

**MMA-IPB siap menjadi mitra
dalam mengembangkan agribisnis anda.**